

IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI KINERJA DAN ABSENSI PEGAWAI (SIKAP) BAGI DISIPLIN PEGAWAI ASN DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Elmayasari¹, Ida Farida²

¹Universitas Bandar Lampung

²Universitas Bandar Lampung

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang pesat karena efek dari globalisasi sehingga sangat terasa di segala bidang kehidupan. Salah satunya dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia yang dikenal dengan e-government. Salah satu contohnya adalah penggunaan aplikasi dalam proses pengolahan data absensi pegawai untuk meningkatkan disiplin pegawai dimana fase ini membuat segala hal dapat dilakukan melalui media digital, termasuk dalam aspek pekerjaan. Peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kinerja dan Absensi Pegawai (SIKAP) Bagi Disiplin Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung sudah berjalan dengan baik diukur dengan teori Edward III akan tetapi, indikator yang belum tercapai yaitu sumber daya manusia sehingga menyebabkan beberapa hambatan dan diperlukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Berdasarkan hasil analisis dan

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 2024

Revised March 2024

Accepted March 2024

Available online March 2024

Kata Kunci:

Implementasi; Aplikasi SIKAP; Disiplin

Keywords:

Implementation; Application SIKAP;

Discipline



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Bandar Lampung.

kesimpulan pada hasil penelitian maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut: perlu adanya koordinasi dan kerja sama antara pimpinan dan para pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dalam mengembangkan, memanfaatkan dan mempertahankan secara optimal serta melakukan penyempurnaan lebih lanjut terhadap aplikasi demi terwujudnya peningkatan dalam penegakkan dan pembinaan disiplin pegawai dan perlu adanya pembinaan pegawai secara bertahap terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

ABSTRACT

The development of information and communication technology has grown rapidly due to the effects of globalization so that it can be felt in all areas of life. One of them is in government administration in Indonesia, known as e-government. One example is the use of applications in the process of processing employee attendance data to improve employee discipline, where this phase allows everything to be done via digital media, including work aspects. Researchers used a qualitative descriptive research design. Data collection was carried out through observation, interviews and documentation. Then the data is analyzed through data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research show that the implementation of the Employee Performance and Attendance Information System (SIKAP) Application for Employee Discipline in the Regional Civil Service Agency of Lampung Province has gone well as measured by Edward III's theory, however, the indicator that has not been achieved is human resources, which causes several obstacles and is necessary. efforts to overcome these obstacles. Based on the results of the analysis and conclusions of the research results, the author proposes the following suggestions: there is a need for coordination and cooperation between leaders and employees at the Lampung Province Regional Civil Service Agency in developing, utilizing and maintaining optimally as well as making further improvements to the application for the sake of the realization of an increase in the enforcement and development of employee discipline and the need for gradual development of employees in mastering science and technology.

1. PENDAHULUAN

Saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang pesat karena efek dari globalisasi sehingga sangat terasa di segala bidang kehidupan. Adanya perkembangan teknologi informasi juga membuat masyarakat di Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari kegiatan komunikasi dan teknologi berbasis internet. Dimana fase ini membuat segala hal dapat dilakukan melalui media digital, termasuk dalam aspek pekerjaan. Kebutuhan informasi dan komunikasi yang cepat dan akurat sangat diperlukan untuk memberikan suatu data yang asli (*real*), khususnya dalam suatu lembaga atau instansi. Dengan terciptanya alat-alat yang serba canggih disuatu lembaga atau instansi dapat membantu, mendapatkan, mengontrol, dan mengolah segala akses data dengan mudah. Sehingga pemanfaatan teknologi informasi tersebut akan membantu lembaga atau instansi dalam mendukung pengambilan keputusan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Selain itu, adanya pemanfaatan teknologi informasi juga dapat terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*).

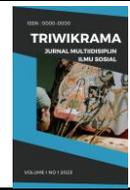
Menurut Muslikhah, (2019), untuk mendukung terciptanya *good governance*, maka dalam pengelolaan data pegawai diperlukan adanya penerapan sistem teknologi dan informasi. Dampak terhadap lembaga atau instansi yang menggunakan sistem teknologi dan informasi dalam pengelolaan data pegawai yaitu tersedianya informasi yang aktual dan akurat sehingga pengambilan keputusan dapat dilaksanakan secara efisien dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan adanya suatu perubahan maka diperlukan suatu manajemen yang baik agar perubahan tersebut dapat berjalan dan diikuti oleh lembaga atau instansi. Keberhasilan suatu instansi tergantung pada kemampuannya untuk mengelola berbagai macam sumber daya yang dimilikinya, salah satu yang sangat penting yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia tidak terlepas dari masalah kedisiplinan, dimana kedisiplinan sangat menentukan hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh seorang pegawai yang ada di dalam lembaga atau instansi terkait. Dengan adanya kedisiplinan yang tegas dan jelas maka dapat menimbulkan kesadaran pegawai dan semangat kerja yang tinggi.

Peraturan yang ada dalam disiplin kerja sangat diperlukan untuk memberikan bimbingan bagi pegawai dalam menciptakan tata tertib yang baik di sebuah lembaga atau instansi. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS Penjelasan umum alinea kedua menjelaskan bahwa untuk mewujudkan PNS yang berintegritas moral, profesional, dan akuntabel, diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin. Penegakan disiplin dimaksud dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja, serta berintegritas moral sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan karier. Kedisiplinan pegawai mutlak diperlukan agar seluruh aktivitas yang sedang dan akan dilaksanakan berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan (Iriani, 2010).

Bagi sebuah lembaga atau instansi adanya disiplin kerja akan menjamin terpeliharanya tata tertib serta kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga diperoleh hasil yang optimal dan dapat terwujudnya tujuan lembaga atau instansi. Penerapan disiplin dikalangan pegawai diharapkan agar para pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh kesadaran serta dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam penerapan disiplin adalah masalah kehadiran (absensi) pegawai. Kehadiran pegawai merupakan hal yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Kehadiran dicatat dalam sebuah daftar hadir atau sistem absensi demi menjaga kedisiplinan pegawai. Sistem absensi sangat penting dalam mengetahui kehadiran pegawai dan sebagai penunjang utama yang dapat mendukung dan memotivasi setiap pegawai dalam menjalankan kegiatan yang dilakukannya.

Salah satu lembaga atau instansi yang memperhatikan penerapan absensi pegawai yaitu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Dalam menerapkan sistem absensi, lembaga atau instansi memiliki sistem yang berbeda-beda Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung sebelumnya telah melakukan absensi *fingerprint* yaitu dengan cara mendeteksi sidik jari di sebuah mesin yang ada di kantor. Namun, hal itu membuat resiko kecurangan pegawai dalam absensi lebih besar karena masih dapat dimanipulasinya mesin *fingerprint*. Kelemahan absensi *fingerprint* juga sangat rentan dimanipulasi karena rekapitulasi dilakukan secara manual dan tidak *real time*. Mengingat bahwa jam kehadiran pegawai menentukan kedisiplinan dan komitmen kerjanya, maka ada kemungkinan file kehadiran pegawai dapat diubah-ubah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga jam kehadiran pun tidak valid.

Menurut pendapat Dahlan dan Ariani (2011) masih banyak sekali masalah yang dihadapi jika menggunakan sistem absensi manual, seperti tidak masuk tanpa keterangan, datang dan pulang kantor tidak sesuai peraturan, keluar kantor saat jam kerja dan tidak sepengetahuan pimpinan dan masih banyak lagi masalah yang ditimbulkan. Kebiasaan tersebut sangatlah buruk dan akan berdampak pada penurunan kinerja pegawai. Hal tersebut bertentangan dengan apa yang telah diberikan oleh lembaga atau instansi baik itu insentif atau balas jasa untuk pegawai. Selain itu, permasalahan yang telah menjadi budaya dalam



suatu instansi yaitu titip menitip absen antar pegawai sangat besar, dan para pegawai selalu merapel paraf pada absen. Padahal salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam peningkatan disiplin adalah masalah absensi pegawai. Tak heran, jika beredar rumor bahwa bekerja di kantor itu santai, dan banyak karyawan yang mempercayakan absensinya kepada rekan kerjanya agar pencatatan kehadirannya tepat waktu. Permasalahan ketidak hadiran harus segera diatasi untuk meningkatkan kedisiplinan pada instansi pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Provinsi Lampung bersama badan kepegawaian daerah Provinsi Lampung tersebut dengan mengambil salah satu langkah dengan diberlakukannya kebijakan e-absensi android atau absensi online berbasis aplikasi dalam melaksanakan dan mengembangkan *E-Government* sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Tujuan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah untuk meningkatkan kedisiplinan, efisiensi para pegawai, dan tata kelola serta manajemen pemerintahan secara nasional. Berdasarkan Surat Menteri PANRB No B/2338/M.PANRB/06/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Penggunaan Absensi Berbasis Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan “mengoptimalkan penggunaan sistem absensi berbasis elektronik guna menghindari adanya kecurangan dan/atau manipulasi data yang berhubungan dengan kehadiran pegawai”.

Aplikasi SIKAP merupakan inovasi baru berupa aplikasi yang menggabungkan sistem absensi dan kinerja pegawai berbasis web dan dapat langsung digunakan melalui ponsel yang dirancang oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dan sudah diterapkan kepada pegawai ASN di kantor pemerintah Provinsi Lampung Oleh karena itu, sejak bulan januari tahun 2022 pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Kinerja dan Absensi Pegawai (SIKAP). Tujuan dari aplikasi SIKAP adalah untuk memudahkan pegawai ASN Melaksanakan absensi dan memberikan pelaporan kegiatan yang telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang disertai dengan media bergambar dan berbasis lokasi. Manfaat dari aplikasi SIKAP adalah memberikan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam menentukan karir ASN, dengan sistem kerja yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan cepat, fleksibel, efektif dan efisien sehingga lebih memudahkan pimpinan dalam melakukan monitor dan evaluasi secara berjenjang terhadap bawahannya.

Aplikasi SIKAP sebagai sebuah teknologi yang baru tentu saja membutuhkan penyesuaian dari pegawai dalam penerapannya, Menurut bapak Putra Kurniawan S.Kom selaku pegawai BKD Provinsi Lampung dan pengamatan penulis secara langsung menjelaskan bahwa terdapat kendala dalam penggunaan aplikasi yaitu, Aplikasi SIKAP sering mengalami error/gangguan jaringan saat pegawai melakukan absensi sehingga menyebabkan kehadiran dari pegawai tidak tercatat dalam sistem aplikasi, Kurangnya keakuratan GPS pada aplikasi SIKAP. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul dalam penelitian ini yaitu “(Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kinerja dan Absensi Pegawai (SIKAP) Bagi Disiplin Pegawai ASN Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung)”.

2. METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat mengenai keadaan atau gejala yang dihadapi. Menurut Sugiyono (2020:9) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2020:7) metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pengumpulan data yang berbentuk kata kata atau gambar-gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran, menguraikan dan menafsirkan keadaan yang ada terkait Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kinerja dan Absensi Pegawai (SIKAP) bagi disiplin pegawai ASN di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian sehingga hasil penelitian lebih terarah, Fokus penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Dan Absensi Pegawai (SIKAP) Bagi Disiplin Pegawai ASN Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui Aspek Penghambat dan Upaya yang dilakukan dalam Implementasi Aplikasi SIKAP Bagi disiplin Pegawai ASN Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

Menurut Moleong (2014:97) fokus penelitian adalah inti yang didapatkan dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi kepustakaan ilmiah. Untuk mengetahui Implementasi



Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Dan Absensi Pegawai (SIKAP) Bagi Disiplin Pegawai ASN Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dalam penelitian ini menggunakan teori menurut George C. Edward III dalam Agustino (2014:149) faktor-faktor penting dalam implementasi kebijakan adalah sebagai berikut :

a. Communication (Komunikasi)

Komunikasi ialah sebuah variabel penting yang mempengaruhi suatu penerapan keijakan publik. Oleh karena itu penerapan yang efektif bisa berjalan jika para pembuat kebijakan hanya dapat diperoleh berdasarkan hubungan yang baik (Agustino 2014:150).

b. Sumber Daya

Menurut Mulyadi (2015:28) Sumber daya adalah menegaskan tiap-tiap keputusan perlu didasari pada sumber daya yang cukup, baik sumber daya manusia maupun sumber daya bentuk finansial. Sumber daya ini berhubungan dengan semua sumber yang bisa dipakai agar bisa menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Agustino (2014:151-152), sumber daya adalah hal penting dalam penerapan kebijakan yang baik.

c. Disposisi

Menurut Edward III dalam Winarno (2014:197) mengatakan “kecenderungan dari para pelaksana kebijakan adalah faktor ketiga yang memiliki dampak vital terhadap seluruh penerapan kebijakan yang efektif.”

d. Struktur Birokrasi

Menurut Mulyadi (2015:29) mengatakan bahwa bentuk sistem pemerintahan menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Sistem penerapan program biasanya telah diatur pada *Standar Operating Procedure* (SOP) yang ditentukan pada guideline program kebijakan.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ialah suatu *tools* yang dipakai pada sebuah penelitian serta mempunyai prinsip dalam mengukur fenomena alam dan sosial yang diamati. Manusia adalah instrumen utama dalam penelitan kualitatif. Pada penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama. Peneliti mengumpulkan data langsung dengan melakukan wawancara, observasi, dan pengambilan dokumentasi di lokasi penelitian. Data yang terkumpul kemudian diolah untuk menjadi sumber informasi yang akurat dalam pemecahan masalah yang ada.

Teknik Pengumpulan Data

Pada suatu penelitian faktor yang menjadi sangat vital yaitu metode pengumpulan data, hal ini menjadi langkah utama dan berperan strategis karena suatu penelitian akan memiliki kekuatan serta bahan dasar untuk meneliti permasalahan yang ada berdasarkan dari sebuah data. Jika tidak menguasai metode pengumpulan data yang dipakai, tentu peneliti bisa memperoleh data yang tidak cocok dengan metode penelitian yang digunakan. Sehubungan dengan Sugiyono (2011:214) yang mengatakan “Metode pengumpulan data ialah tindakan yang sangat strategis pada sebuah penelitian, sebab tujuan utama dalam penelitian yaitu memperoleh data”. Pada penelitian ini penulis memakai metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Observasi, adalah sebuah aktivitas peninjauan secara langsung dengan cara yang terstruktur untuk mengambil data yang berada di lokasi penelitian.
2. Wawancara, merupakan teknik pengambilan data dengan cara menghimpun data melalui tanya jawab lisan kepada narasumber/informan untuk memperoleh data dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan. Dalam upaya pengumpulan data terkait penelitian ini, penulis menggunakan wawancara semi terstruktur dikarenakan peneliti dapat bebas dan fleksibel memberikan pertanyaan kepada informan akan tetapi tetap berpedoman pada pertanyaan yang telah di siapkan sehingga penulis bisa mendapat informasi yang mendalam mengenai Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kantor Virtual Pegawai (SIKAP) dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
3. Dokumentasi, adalah sebuah rekaman kejadian lampau baik berupa tulisan, gambar maupun karya monumental dari seseorang. Dokumen bentuk tulisan bisa seperti catatan harian, laporan, peraturan, kebijakan, serta liputan media massa/elektronik sedangkan dokumen dalam bentuk gambar dapat berupa photo, video, sketsa dan gambar dapat berupa photo, video, sketsa dan lain-lain.

Subjek Penelitian dan Informan

Subjek penelitian ini ialah seorang yang memberikan informasi terkait judul penelitian “Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kantor Virtual Pegawai Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung” seseorang yang memberikan informasi tersebut disebut informan. Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi, menurut (Sugiono,2018:2016) tidak menggunakan istilah populasi pada penelitian kualitatif,

melaikan social situation atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu, tempat (*place*), pelaku (*actor*) dan aktivitas (*activity*). Situasi sosial dapat di nyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi didalamnya.

Adapun informan pada penelitian ini meliputi kriteria dibawah ini:

1. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
2. Staff bagian kedisiplinan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung (2 orang)
3. Pegawai ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung (2 orang)

Sumber dan Jenis Data

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti perlu memperoleh data-data yang dapat memudahkan peneliti melakukan penelitian. Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data primer dan data sekunder.

1. Data primer, data yang didapat langsung lewat subyek serta orang-orang yang dijadikan informan yang menguasai inti permasalahan ataupun obyek penelitian. Adapun data yang dibutuhkan meliputi wawancara kepada aparat yang dianggap memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan hasil observasi dari pengamatan yang dilakukan peneliti ketika turun ke lapangan.
2. Data sekunder, data yang didapatkan dengan cara tidak langsung melalui sumber utama melainkan dari pihak lain ataupun dari sumber yang sudah ada. Adapun data yang di butuhkan meliputi literatur serta dokumen terkait penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2018) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

1. Reduksi data (Data Reduction)

Menurut Sugiyono (2018) Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya namun yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami Sugiyono (2018).

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion drawing/Verification)

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018) kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Keabsahan Data

Salah satu cara yang dapat digunakan dalam proses pengabsahan data hasil penelitian adalah dengan hasil triangulasi, yaitu sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dan dapat diperoleh dari berbagai cara, dan berbagai waktu menurut Wiliam Wiersma (Sugiono, 2018: 273-274) berikut ini teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang diperoleh dari hasil wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung yang beralamat di Jl. WR. Wonginsidi No. 69 Bandar Lampung, Lampung. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena lokasi ini strategis dalam pengumpulan data yang terkait dengan fokus penelitian yang akan penulis teliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Aplikasi SIKAP Bagi Disiplin Pegawai Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung

Aplikasi SIKAP di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung mulai diberlakukan pada Januari 2022 kemudian dikembangkan pada tahun 2023. Implementasi Aplikasi SIKAP ini bertujuan untuk memudahkan proses pengumpulan rekapitulasi daftar hadir dan pendataan laporan kerja pegawai dengan cara menginput data kehadiran melalui aplikasi yang dapat diakses oleh semua pegawai. Tujuan dari aplikasi SIKAP adalah untuk memudahkan pegawai ASN melaksanakan absensi dan memberikan pelaporan kegiatan yang telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang disertai dengan media bergambar dan berbasis lokasi. Manfaat dari aplikasi SIKAP adalah memberikan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam menentukan karir ASN, dengan sistem kerja yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan cepat, fleksibel, efektif dan efisien sehingga lebih memudahkan pimpinan dalam melakukan monitor dan evaluasi secara berjenjang terhadap bawahannya.

Di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung sebelum adanya aplikasi Sistem Informasi Kinerja dan Absensi Pegawai (SIKAP) proses pelaporan daftar hadir pegawai masih menggunakan alat *pingerprint* dan manual berupa laporan kertas yang dikumpulkan atau dilaporkan. Sistem manual tersebut masih dianggap kurang maksimal karena proses yang dilakukan masih terbilang lambat. Aplikasi SIKAP ini dibuat juga untuk digunakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Provinsi Lampung. Penerapan sistem pelaporan online untuk daftar hadir pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung telah menjadi instrumen penting dalam memantau kedisiplinan pegawai. Dengan sistem ini, organisasi dapat secara efektif mengevaluasi tingkat kehadiran dan kinerja pegawai setiap hari. Dampaknya sangat signifikan, memungkinkan identifikasi cepat terhadap pelanggaran disiplin serta pemberian sanksi atau insentif sesuai dengan ketentuan. Ini mencerminkan komitmen Badan Kepegawaian Daerah dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme pegawai, sejalan dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam pembinaan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Penerapan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Dan Absensi Pegawai (SIKAP) Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung ini peneliti menggunakan dimensi implementasi dari George C. Edward III dalam Agustino (2014:149) yang terdiri dari 4 dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sebagai acuan dan pedoman untuk melihat bagaimana implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Dan Absensi Pegawai (SIKAP).

Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menganalisis bahwa penyebaran informasi sudah dilakukan dengan baik melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. Oleh karena itu, dengan informasi yang sudah jelas disampaikan kepada setiap pelaksana kebijakan, diharapkan semua pegawai bisa melaksanakan kebijakan yang telah diterapkan dengan baik. Kemudian dalam kejelasan informasi petunjuk pelaksanaan dalam proses Implementasi tidak hanya diterima oleh aparat pelaksana tetapi harus sejalan dengan kejelasan penyampaian kebijakan tersebut agar tepat tersampaikan. Kejelasan informasi sangat mempengaruhi apakah komunikasi ini dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh para pegawai yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung terkait Implementasi Aplikasi SIKAP. Petunjuk pelaksanaan dalam penerapan Implementasi Aplikasi SIKAP di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung sudah sangat jelas dan mendetail. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung sendiri sudah melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait petunjuk penggunaan dan tata cara pelaksanaannya juga sudah sangat jelas.

Serta pelaksanaan Implementasi akan berjalan dengan baik apabila instruksi- instruksi pelaksanaannya harus dilakukan secara konsisten dan terpadu. Implementasi Aplikasi SIKAP di kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung sudah dilaksanakan secara konsisten, Konsistensi penerapan Aplikasi SIKAP ini dapat dilihat dari laporan yang dilaporkan oleh pelaksana kebijakan, dimana hal ini juga akan diproses langsung Pembinaan Disiplin dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang tidak hadir atau masuk kerja tanpa alasan Selain itu juga, harus ada kontribusi dari pimpinan untuk memaksimalkan penggunaan Aplikasi yang dibuat untuk mempermudah pegawai dalam melaporkan kehadiran dan laporan kerjanya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi sudah disebar dengan baik. Hasil analisis peneliti didukung oleh Menurut Edward III dalam Agustino (2014:150) mengatakan bahwa “implementasi yang efektif akan terlaksana apabila para pembuat keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik”. Jadi, hal tersebut harus dilakukan agar pelaksanaan suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana.

Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menganalisis dalam hal ini pegawai sebagai sumber daya yang berkualitas tinggi akan memastikan bahwa program dijalankan dengan baik. Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kinerja dan absensi Pegawai (SIKAP) dimaksudkan untuk meningkatkan disiplin pegawai. Sebelum ini pelaporan masih dilakukan secara manual, sehingga sulit untuk mengidentifikasi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan tingkat kehadiran dan pelaksanaan tanggung jawab. Selain itu, prosesnya juga lambat. Meskipun demikian, dengan menggunakan Aplikasi SIKAP ini penegakkan disiplin pegawai menjadi lebih baik karena pegawai yang melanggar disiplin dapat lebih mudah terdeteksi sehingga pegawai akan takut untuk mengulangi kesalahannya.

Kemudian penerapan pemahaman mengenai Aplikasi Sistem Informasi Kinerja dan absensi Pegawai (SIKAP) sudah diberikan pemahaman dengan baik kepada seluruh pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung meskipun ada sebagian pegawai ASN yang gptek merupakan hambatan dalam implementasi aplikasi SIKAP karna dalam proses ini harus di dukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas tetapi tidak menjadi alasan pegawai tidak menggunakan aplikasi tersebut karna aplikasi ini membantu dalam proses penengakkan disiplin pegawai dan pembinaan disiplin sehingga pegawai harus terus belajar dan menerima adanya aplikasi tersebut. Serta fasilitas penunjang penerapan aplikasi SIKAP yaitu pegawai telah dilengkapi oleh perangkat komputer namun ada hambatan dalam pengelolaan aplikasi SIKAP yaitu penggunaan aplikasi lambat disebabkan jaringan yang tidak stabil sehingga pegawai tidak bisa mengakses aplikasi.

Sehingga dalam hal ini sumber daya belum memadai. Dalam proses penerapan jika sumber daya manusia telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik, akan tetapi tidak didukung dengan fasilitas sarana prasarana yang memadai maka akan dipastikan proses penerapan suatu program tidak akan berjalan. ada beberapa hambatan yaitu ada sebagian pegawai ASN yang gptek dan jaringan yang terkadang tidak stabil. Hasil analisa peneliti di dukung oleh Widodo (Sutojo,2015:4) mengatakan bahwa, “implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber daya yang didalamnya termasuk manusia, dana dan kemampuan operasional, oleh pemerintah maupun swasta (individu maupun kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Disposisi

bahwa dalam penerapan aplikasi SIKAP ini tidak banyak merubah susunan kepegawaian di BKD Provinsi Lampung kecuali pegawai yang memiliki tugas tambahan yaitu sebagai admin dari aplikasi SIKAP. Dan penerapan Aplikasi SIKAP ini dalam pelaksanaannya ada insentif yang diberikan kepada pegawai atau staff yang menjadi tenaga admin atau administrator Aplikasi, selain itu ada juga mengenai tambahan penghasilan pegawai. dimana sebelumnya hal ini sudah pernah diajukan mengenai insentif.

Sehingga dapat disimpulkan mengenai disposisi sudah berjalan dengan baik karena tidak banyak merubah susunan kepegawaian sebelum ataupun sesudah adanya aplikasi SIKAP dan bagi admin aplikasi SIKAP mendapatkan intensif tambahan. Hasil analisa peneliti didukung oleh George C. Edward III (dalam Agustino, 2006:152) yaitu: Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menganalisis bahwa Badan Kepegawaian Provinsi Lampung telah melakukan komunikasi dengan petugas OPD dan pegawai sebelum pelaksanaan aplikasi SIKAP dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan pegawai dan tidak terlalu banyak perubahan yang terjadi pada pembagian kerja pegawai. Perbedaannya adalah pegawai memiliki tugas lebih dalam pekerjaannya. Tugas yang diberikan adalah sebagai admin Aplikasi SIKAP yang bertanggung jawab atas penginputan data secara rutin. Penerimaan data secara real tentang kehadiran pegawai dan laporan kerja dari setiap pegawai dan mendeteksi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam prosedur penggunaan aplikasi SIKAP sudah disampaikan dengan baik melalui petugas yang di tunjuk OPD dan pegawai sebelum pelaksanaannya dan untuk pembagian kerja tidak terlalu banyak mengalami perubahan sebelum atau sesudah adanya aplikasi SIKAP. Hasil peneliti didukung oleh George C. Edward III (dalam Agustino, 2008:153) yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi.

Aspek Penghambat Implementasi Aplikasi SIKAP Bagi Disiplin Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung

Penerapan suatu kebijakan tidak selalu berjalan dengan sesuai harapan atau yang diinginkan, kendala atau hambatan pasti terjadi dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Dan Absensi Pegawai (SIKAP) Bagi Disiplin Pegawai ASN Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung masih terdapat kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya yaitu:

1. Lemahnya Sistem Aplikasi

Faktor penghambat dalam penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kinerja dan Absensi Pegawai (SIKAP) ini adalah lemahnya sistem aplikasi. Karena banyak masalah pegawai yang telah melakukan absensi tapi tidak tercatat dalam sistem aplikasi. Hal tersebut disebabkan oleh jaringan yang kurang stabil sehingga aplikasi yang digunakan untuk absensi lambat. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa lemahnya koneksi internet akan sangat mengganggu kegiatan bekerja pegawai.

2. Sumber Daya Manusia Terbatas

Faktor penghambat dalam penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kinerja dan Absensi Pegawai (SIKAP) adalah pegawai yang gapap teknologi. Sumber daya manusia sangat mempengaruhi proses pelaksanaan suatu kegiatan Dalam implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kinerja dan Absensi Pegawai (SIKAP) dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten, karena pada masa ini penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mumpuni sangat dibutuhkan dalam dunia kerja.

Upaya Untuk Mengatasi Hambatan implementasi Aplikasi SIKAP di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung

1. Pemberian sanksi/peringatan yang tegas bagi pegawai

Untuk meningkatkan kesadaran setiap pegawai terkait kebijakan ini maka harus adanya sanksi dalam pelaksanaannya. Upaya dilakukan dalam meningkatkan implementasi aplikasi SIKAP salah satunya adalah dengan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaksana kebijakan. Karena dengan adanya sanksi tersebut diharapkan ada efek jera sehingga bisa melakukan pengawasan dan bisa melakukan penegakkan disiplin bagi pegawai yang melanggar. Sehingga bisa diproses dengan cepat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Menyempurnakan Sistem Aplikasi

Masalah yang sering timbul dari Aplikasi ini salah satunya sistem aplikasi yang terkadang menghambat, penyempurnaan sistem aplikasi SIKAP.

3. Penambahan kualitas Sumber Daya Manusia

Yang dilakukan terkait masalah sumber daya manusia adalah dengan mengadakan pelatihan khusus kepada para pegawai terkait penguasaan ilmu teknologi, dengan melakukan bimbingan teknis terlebih dahulu. Jadi, upaya yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung mengatasi hambatan yang terjadi dalam implementasi aplikasi sehati antara lain adalah memberi sosialisasi bagi pegawai serta mengoptimalkan sistem aplikasi.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Dan Absensi Pegawai (SIKAP) Bagi Disiplin Pegawai ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung peneliti menyimpulkan:

1. Secara umum Implementasi Aplikasi SIKAP Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung sudah berjalan dengan baik diukur melalui 4 dimensi yakni komunikasi dimana penyebaran informasi sudah dilakukan dengan baik melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, sumber daya dalam penerapannya belum dilakukan dengan baik, pegawai sudah diberi pemahaman tetapi belum didukung dengan sarana prasarana yang memadai sehingga

menyebabkan ada beberapa hambatan, disposisi dalam penerapannya berjalan baik karena terdapat pemberian reward berupa insentif serta struktur birokrasi dalam penerapannya berjalan baik dimana tidak terlalu banyak perubahan yang terjadi pada pembagian kerja pegawai.

2. Faktor penghambat dalam implementasi
 - a) Lemahnya sistem aplikasi karena koneksi jaringan yang kurang baik.
 - b) Sumber daya manusia yang terbatas khususnya untuk menerapkan aplikasi SIKAP.
3. Upaya yang dilakukan dalam implementasi Aplikasi SIKAP ini adalah :
 - a) Pengoptimalan sistem aplikasi, dengan membuat server tersendiri dan kuat dalam penerapan aplikasi SIKAP.
 - b) Pemberian Pemberian reward dan sangksi yang tegas bagi pegawai yang melanggar aturan yang telah ditetapkan.
 - c) Mengadakan sosialisasi ataupun pelatihan khusus terhadap pegawai terkait penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti uraikan di atas maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti terkait implementasi aplikasi SIKAP Bagi disiplin pegawai ASN di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung adalah:

1. Perlu adanya koordinasi dan kerja sama antara pimpinan dan para pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dalam mengembangkan, memanfaatkan dan mempertahankan secara optimal serta melakukan penyempurnaan lebih lanjut terhadap aplikasi demi terwujudnya peningkatan dalam penegakkan dan pembinaan disiplin pegawai.
2. Perlu adanya sosialisasi ataupun pembinaan pegawai secara bertahap terhadap penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

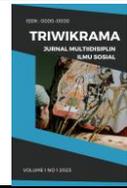
5. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Cahyana. 2015. *Konsep Pengamanan dan Perlindungan Infrastruktur Berbasisteknologi Informasi, Kementrian Komunikasi dan Informasi.*
- Harsono. 2011. *Sistem Administrasi Kepegawaian.* Bandung: Fokusmedia. Hasibuan, Malayu. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Indrajit, Richardus Eko 2002. *Membangun Aplikasi E-Government.* Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik Bandung: Alfabeta.* Nazir, Moh. Ph. D. 2009. *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan.* Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta
- Simamora, Henry, (2001). *"Manajemen Sumber Daya Manusia", Yogyakarta :YKPN.*

Jurnal:

- Dahlan, M., & Ariani, R. 2017. *Efektivitas Absensi Elektronik Terhadap Disiplin Dan Kinerja PNS Di Kabupaten Kutai Kartanegara. Gerbang Etam, 11(1).*
- Iriani, N. I. 2010. *Motivasi Intrinsik, Motivasi Ekstrinsik dan Disiplin Kerja Pengaruhnya terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas. Jurnal Aplikasi Manajemen, 8(2),561-569*



Oktariani, T.Q., Purwanti, D. & Mulyadi, A. 2021. *Pengaruh Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Absensi Pegawai Terhadap Kedisiplinan Pegawai*. Jurnal GOVERNANS, 7(2): 81–88.

Sapuan, deni, R., (2021). *Penerapan Sistem Absensi Online Berbasis Android*. Jurnal teknologi dan sistem informasi bisnis 3(1) 1-9

Muh aditya A.P 2022. *Implementasi Aplikasi Simponi Gabrata Asn dalam disiplin pegawai Dibadan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara*

Peraturan perundang undangan:

Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 *tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*

Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2021 *tentang disiplin pegawai negeri sipil*

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.39 Tahun 2019 *tentang Satu Data Indonesia*

Sumber lainnya:

<https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/gubernur-arinal-launching-aplikasi-sikap-untuk-tingkatkan-pelayanan-berbasis-digital>

<https://dev1.sikap.lampungprov.go.id/>

<https://www.scribd.com/document/580622112/juknis-sikap>